BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Demokrasi lokal era reformasi merupakan substansi politik di balik kebijakan desentralisasi pemerintahan yang disebut dengan otonomi daerah. [1] Demokrasi lokal sebagai konsep alternatif berangkat dari kondisi fluktuasi demokrasi semenjak era orde lama, orde baru dan reformasi. Tuntutan kebijakan desentralisasi diwujudkan dengan memberikan ruang partisipasi politik publik secara maksimal di setiap daerah di Indonesia. [2] Dengan kata lain, demokrasi lokal merupakan bentuk devolusi politik yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik.[3]

---

[1] Demokrasi lokal, menurut Sutoro Eko, seringkali difahami sebagai bentuk liberalisasi politik yang berwajah protes. Meski demikian, demokrasi lokal di Indonesia secara ideal menitikberatkan pada transformasi nilai-nilai demokratis yang semula bersifat makro menuju mikro, yakni dari pusat ke daerah. Transformasi nilai termaksud menegaskan bahwa sistem politik yang demokratis adalah bagaimana kebijakan umum ditentukan oleh kekuatan mayoritas wakil rakyat dalam kendali dan pengawasan publik. Menurut Dahl, terdapat enam prinsip implementasi demokrasi; *pertama*, pemimpin yang dipilih melalui pemilu. *Kedua*, pemilu yang jurdil dan periodik. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. *Keempat*, keterbukaan akses informasi publik. *Kelima*, otonomi asosiasional bagi warga. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang bersifat inklusif. Sementara konteks demokrasi lokal sejauh ini menitikberatkan pada beberapa nilai utama, yakni kesamaan, kebebasan berpendapat dan musyawarah untuk mufakat. Lihat, Sutoro Eko, *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: APMD Press, 2004), Siti Zuhro, et, al, *Demokrasi Lokal*: *Perubahan Dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali* (Yogyakarta: Ombak, 2009).

[2] Semenjak runtuhnya orde baru tahun 1998, demokrasi prosedural mengalami perkembangan signifikan melalui proses pemilu dengan partisipasi masyarakat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang memainkan peran politik penting baik pada tingkat nasional maupun lokal. Lihat, Pratikno dan Nanang Indra K, "Struggle to Gain Representation: Mixed Politics in Democratizing Indonesia", dalam *Journal of Power Conflict and Democracy in South and Souheast Asia*, No. 1. Vol. 2. 2010, 119-136.

[3] Terdapat dua perspektif utama tentang desentralisasi, yaitu *political decentralisation perspective* (perspektif desentralisasi politik) dan *administrative decentralisation perspective* (perspektif desentralisasi administratif). Perspektif pertama mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (*devolution of power*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara perspektif kedua mendefinisikan desentralisasi sebagai pendelegasian otoritas atau kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara administratif. Lihat, Syarif Hidayat, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif State Civil Society Relations", dalam, ed, Syamduddin Haris, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI dan YOI, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski demikian, kebijakan demokrasi lokal di atas menampakan dinamika politik menarik baik secara struktural maupun sosio-kultural. Dalam struktur kekuasaan, pelaksanaan demokrasi lokal diharapkan mampu mewujudkan dan merealisasikan secara strategis konsep kedaulatan rakyat melalui prosedur kebijakan publik (*public policy*) berupa partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas kebijakan serta partisipasi politik. [4] Dengan kata lain, esensi demokrasi lokal tidak sekedar bersifat normatif sebagaimana konsepsi kedaulatan rakyat di atas namun diwujudkan melalui prosedur dan mekanisme sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses kebijakan publik. [5]

Sementara pada arena sosio-kultural, demokrasi lokal menuntut peningkatan dan pengembangan partisipasi publik melalui komunikasi, interaksi dan partisipasi politik terkait kebijakan publik yang dilaksanakan dalam struktur pemerintahan, khususnya lembaga legislatif daerah. Agenda komunikasi politik dan partisipasi publik tersebut merupakan bagian dari hak-hak publik (*public rights*) untuk mengetahui sejauh mana kinerja anggota legislatif daerah yang dipilih secara demokratis dalam pemilu lima tahunan. Dari sini konsep dan makna kedaulatan rakyat tidak sekedar bersifat normatif namun terwujud secara konkrit melalui proses dan mekanisme kebijakan publik.

---

[4] Lihat, Syaukani, Ryas Rasyid, Affan Ghaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

[5]Diantaranya ditegaskan dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perubahan paradigma pembangunan yang semula bersifat dari atas ke bawah (*top down*) dirubah dari bawah ke atas (*button up*). Perubahan paradigma sesuai aturan tersebut mencakup forum musyawarah perencanaan pembangunan dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat secara luas. Secara teoritik, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses kebijakan pemerintahan demokratis baik secara langsung maupun secara representatif. Lihat, I. Nengah Suriata, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Demokrasi* (Tesis-Universitas Udyana, Denpasar, 2011), 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh ini prinsip dan nilai demokratis di atas belum menampakan perkembangan maksimal. Padahal prinsip tersebut merupakan unsur mendasar bagi proses perubahan kehidupan politik lokal yang lebih baik. Demokrasi lokal baik secara struktural maupun sosio-kultural menggambarkan ketimpangan politik dan kebijakan demikian lebar.

Ketimpangan tersebut tidak lepas dari tradisi dan budaya politik yang diartikulasikan oleh elit struktural, khususnya anggota legislatif daerah. Korupsi politik sebagai bentuk penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) sebagi fenomena nasional juga terjadi pada tingkat lokal. Kebijakan desentralisasi yang diharapkan berpijak pada prinsip dan nilai demokratis justru melahirkan apa yang disebut sebagai desentralisasi korupsi (*decentralization of corruption*).[6]

Korupsi politik merupakan bagian dari fenomena dan realitas penyimpangan struktural di lembaga legislatif. Desentralisasi korupsi menggambarkan proses transmisi penyimpangan struktural yang semula terkonsentrasi di pusat kemudian merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Di lembaga legislatif, problem penyalah-gunaan kekuasaan merupakan fakta moral (*moral fact*) yang tidak bisa dipungkiri. Problem tersebut melekat ke dalam peran dan fungsi institusional; fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran dan beberapa fungsi lain.[7]

---

[6] Dalam kajian Shah dan Schacter bahwa korupsi sebagai bagian penyalahgunaan kekuasaan mempunyai tiga bentuk yang dilakukan oleh aktor negara, termasuk politisi; 1) *grand corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kecil pejabat terhadap alokasi sumber daya publik. 2) *state or regulatory capture* adalah kolusi yang dilakukan oleh lembaga publik dengan kalangan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. 3) *bureaucratic corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh jumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatannya yang biasanya berupa uang pelicin dan sebagainya. Sebagian elit politik biasanya melakukan korupsi pada nomer pertama dan kedua. Lihat, Budi Setiyono, "Korupsi Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi Civil Society: Suatu Tinjauan Teoritis", *Jurnal Politika*, Vol. 1, No. 1, 2010, 5.

[7] Dalam UU 32 tahun 2004 pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip demokratis dalam proses kebijakan legislasi berikut produk hukum yang dihasilkan pada dasarnya mengandung prinsip transparansi, partisipasi dan komunikasi yang mencakup hak-hak publik dalam kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan sebagainya. prinsip transparansi, partisipasi dan komunikasi merupakan prosedur kebijakan yang sejauh ini menjadi kelemahan di daerah. Kelemahan tersebut pada gilirannya melahirkan distansi dan distorsi politik kebijakan di bidang legislasi sehingga publik tidak banyak memahami tentang proses politik di balik kebijakan tersebut.

Di samping itu, penyalah-gunaan kekuasaan dalam demokrasi prosedural tersebut tidak sekedar dibuktikan dengan produk hukum yang tidak populis dan demokratis, namun sebagaimana ditegaskan Smith, juga berkaitan dengan orientasi kebijakan lain yang bersifat kapitalis dan neo-liberalis yang mengorbankan kepentingan publik (*public interest*).[8] Nuansa kebijakan kapitalis dan neo-liberalis berupa akumulasi kapital oleh fihak tertentu yang dinilai memegang otoritas dan kewenangan dalam memainkan politik anggaran, pangawasan dan legislasi.

---

pasal 41 ditegaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Beberapa fungsi tersebut lebih jauh ditegaskan dalam pasal 42 bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain; Membentuk peraturan daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dan kerjasama internasional di daerah. Disamping fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, terdapat fungsi lain yang memperkuat ketiganya mencakup hubungan dengan lembaga eksekutif selaku pelaksana kebijakan. Hak interpelasi dan hak angket misalnya juga merupakan otoritas yang dimiliki oleh kelembagaan legislatif. Untuk tinjauan tentang institusi legislatif ini, lihat misalnya, Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2012). Tiga fungsi sebagai cermin prinsip demokrasi dapat merujuk pada teori ketatanegaraan klasik khususnya gagasan *trias politica* yang bertujuan disamping separasi kekuasaan juga keseimbangan antar institusi tersebut. lihat, Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 44.

[8] BC. Smith, *Decentralization*: *The Territorial Dimension of the State* (London: George Allen and Unwin, Inc, 1985), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi dan peran bidang penganggaran juga mengandung problem etis yang diwujudkan dengan perilaku atau praktek korupsi kekuasaan. Fenomena penyalah-gunaan kekuasaan atau korupsi politik dilakukan secara sistematis maupun politis sebab fungsi dan peran tersebut dilaksanakan bersama dengan fihak eksekutif. Otoritas dan kekuasaan dalam fungsi dan peran tersebut sejauh ini berkaitan dengan belanja pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Rangkaian penyalah-gunaan kekuasaan berkaitan dengan bidang pengadaan barang dan jasa, anggaran kelembagaan berupa program kerja dan sebagainya.[9] Fenomena tersebut menggambarkan distingsi tersendiri bagi setiap daerah di Indonesia.[10]

Peran dan fungsi pengawasan, disamping legislasi dan penganggaran, juga tidak bisa dilepaskan dari gejala perilaku penyalah-gunaan kekuasaan. Bentuk penyalah-gunaan kekuasaan di sini tidak saja mencakup standar obyektifitas dan subyektifitas sebagai prosedur namun juga mengandung standar ganda (*double standard*) bagi kepentingan dan orientasi politik tertentu. Peran dan fungsi pengawasan menggambarkan model kekuasaan dominatif dan hegemonik atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif daerah. Proses pengawasan pada akhirnya menghasilkan evaluasi terhadap kinerja berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh eksekutif.

---

[9] Istilah "home stay pay" digunakan oleh Kacung Marijan dalam mengkritisi perilaku politik anggota legislatif baik pusat maupun daerah. Istilah tersebut menegaskan tentang kebijakan bidang penganggaran yang memprioritaskan kepentingan institusional berupa beberapa program misalnya perjalanan dinas, studi banding baik dalam maupun luar negeri, perlengkapan dan sebagainya. Lihat, Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*: *Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010).

[10] Kajian yang dilakukan Scontleitner di beberapa negara Amerika Latin juga menampakan gejala yang sama dimana munculnya klientisme antara pengusaha dengan elit politik mengakibatkan apa yang disebut dengan "*ungovernability*", yakni kondisi dan situasi dimana prinsip-prinsip pemerintahan tidak berjalan total. Kondisi dan situasi tersebut melibatkan berbagai fihak dalam struktur pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Lihat, G. Scontleitner "Can Public Deliberation Democratize State Action" dalam *Politicing Democracy*: *The Local Politics of Democratization*, eds, John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 76-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh ini, fenomena menarik dalam proses pengawasan berikut angka evaluasi kinerja yang dihasilkan oleh legislatif menggambarkan komersialisasi dan transaksi politik mengingat angka evaluasi tersebut tidak lebih bersifat politis ketimbang obyektif. Dominasi kepentingan politik di balik fungsi dan peran tersebut lebih dilatarbelakangi pertimbangan pencarian popularitas dihadapan publik. Aspek keberhasilan dan kegagalan dalam sistem evaluasi dalam fungsi dan peran pengawasan pada akhirnya, berikut dua fungsi diatas, lebih menampakan dimensi kepentingan pragmatis ketimbang pengejawantahan prinsip dan nilai demokrasi yang berfihak pada publik. [11]

Legislasi, penganggaran dan pengawasan sebagai peran dan fungsi lembaga legislatif berasal dari produk hukum ketatanegaraan yang telah berjalan sejak lama bersamaan dengan penerapan sistem atau model demokrasi keterwakilan (*representative democracy*).[12] Meski demikian tiga bentuk fungsi tersebut tidak bisa mengabaikan dimensi subyektifitas legislator bersangkutan, yakni kecenderungan orientasi dan kepentingan pragmatis yang bersifat laten.[13]

Dengan kata lain, produk hukum ketatanegaraan tersebut pada satu sisi bersifat normatif namun pada sisi lain bersifat pragmatis yang tersembunyi di balik normatifitas hukum tersebut. Dengan demikian, terjadi fenomena yang menggambarkan perpanjangan nalar atau rasio instrumentalis di balik rasio

---

[11] Lihat, Arie Sujito, *Pendangkalan Politik* (Yogyakarta: IRE, 2012), 7-8.

[12] Konsep keterwakilan atau representasi memuat sikap responsif dalam merepresentasikan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Berbagai perbedaan tersebut harus dibawah kedalam arena kebijakan publik. Berbagai perbedaan tersebut harus berakar dari dimensi geografis, etnis, agama, aliran politik, gender dan sebagainya yang direpresentasikan pada tingkat nasional. Lihat, John K. Johnson, *The Role of Parliament in Government* (Washington DC: World Bank Institute Working Papers, 2005), 2.

[13] Kompetensi etis dan moral, menurut Rothwell, merupakan unsur penting disamping kompetensi sosial dan strategis. Dalam konteks politik, kompetensi tersebut juga menjadi kelemahan mendasar bagi anggota legislatif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Lihat, Tienaswati W dan Sri Wahyu KS, "Kajian Kompetensi Anggota DPRD Sukabumi Jawa Barat", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normatif yang belum banyak menjadi perhatian. Rasio normatif berada dalam teks hukum yang difungsikan sebagai sistem dan aturan namun rasio instrumental mengambil celah dan peluang di balik sistem dan aturan yang bersifat laten demi pencapaian tujuan-tujuan pragmatis.

Gejala dominasi rasio instrumental dalam demokrasi lokal berintegrasi dengan kemenangan demokrasi liberal semenjak runtuhnya komunisme. [14] Meski demikian, kemenangan demokrasi liberal tersebut tidak berbanding lurus dengan komitmen dan konsistensi mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sistem dan mekanisme yang berfihak pada publik. Sebaliknya, demokrasi liberal menjadi arena bagi kekuatan borjuis dalam payung neo-liberalisme, baik global maupun lokal, dalam menjalankan politik kartel. [15]

Langkah politik tersebut berupa intervensi kebijakan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif yang mengandung potensi modal dan sarana produksi. Fenomena ini berdampak munculnya pergeseran orientasi politik kebijakan yang mestinya berfihak pada publik berubah menjadi kepentingan borjuis lokal. Pergeseran orientasi kebijakan tersebut meruanglingkupi peran dan fungsi lembaga legislatif, terutama tiga fungsi diatas, dengan menutup ruang publik dan komunikasi politik dengan masyarakat.

Dari persoalan di atas maka demokrasi lokal sebagai konsepsi yang pernah ditegaskan oleh Tocqueville berikut prinsip-prinsipnya masih belum menampakan tipe ideal sesuai harapan. [16] Konsep tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemikiran

---

[14] Lihat, Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: The Free Press, 1992).

[15] Lihat, Ambardi Kuskridho dan Zaim Rofiki, *Mengungkap Politik Kartel* (Jakarta: KPG, 2009).

[16] Di antara prinsip yang ditegaskan adalah menyangkut modal sosial (social capital) yang terdiri atas kepercayaan yang dihasilkan oleh ikatan solidaritas. Relevansi modal sosial dalam perspektif demokrasi politik adalah menyangkut legitimasi dan kepercayaan sosial yang diberikan kepada elit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik abad klasik dan pertengahan tentang hubungan antara negara dan masyarakat.[17] Sebagai substansi dan esensi di balik kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, maka pengembangan demokrasi lokal memerlukan pemikiran dan aksi politik berkaitan dengan substansi dan orientasi politik yang terkandung di dalamnya. Meski demikian, substansi dan orientasi politik tersebut tidak bisa mengabaikan dimensi subyektif legislator dan relasinya dengan realitas politik obyektif.

Dengan kata lain, dimensi subyektif menegaskan tentang individu legislator dalam struktur kekuasaan yang bersifat obyektif. Dalam struktur kekuasaan tersebut, terjadi proses dialektika dengan berbagai unsur baik aturan juridis-normatif, tanggung-jawab etis dan moral publik dan sebagainya. Lembaga legislatif baik dalam perspektif hukum maupun politik, merupakan ide agung yang muncul semenjak abad pertengahan yang dikenal dengan trias politika. [18] Ide tersebut menjadi sumber dan inspirasi bagi lahirnya demokrasi keterwakilan (*representative democracy*) yang dijalankan oleh anggota legislatif di lembaga parlemen baik pusat maupun daerah.[19]

---

politik tersebut. Lihat, Axel Hadenius, *Institutions and Democratic Citizenship* (New York: Oxford University Press, 2001), 1-3.

[17] Ibid.

[18] CST Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 8.

[19] Menurut Sargent, terdapat dua model demokrasi, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi keterwakilan (*representative democracy*). Dua model tersebut menggambarkan perbedaan dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Dalam demokrasi keterwakilan, penyaluran aspirasi harus melalui wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Meski demikian, perkembangan demokrasi pasca orde baru sebagian memperlihatkan bahwa penyaluran aspirasi tersebut disamping melalui lembaga legislatif juga secara langsung melalui lembaga eksekutif. Sementara menurut Mezey, perbandingan dua model tersebut mencakup; *public policy is made bay representatives of the people and not by the people themselves, these representatives are elected by the citizens, representatives are accountable for their actions to those who elect them and can be replaced by them in the next election*. Lebih jauh tentang model demokrasi tersebut, lihat, Lymann Tower Sargent, *Ideolog-ideologii Politik Kontemporer*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Bina Aksara, 1987)., Michael L. Mezey, *Representative Democracy*: *Legislators and Their Constituents* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc), 2., John Gastil, *By Popular*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sisi lain, proses demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dialektika antara demokrasi dengan Islam yang direpresentasikan oleh elit agama tersebut. Dialektika tersebut menegaskan bahwa hubungan keduanya tidak saja mencakup kompabilitas sistem demokrasi dengan nilai-nilai Islam namun juga meniscayakan dimensi etis dibalik kompabilitas tersebut. Kompabilitas antar keduanya mendasari proses politik yang terjadi semenjak orde lama, orde baru dan era reformasi dengan menampakan dinamika khas. [20] Meski dialektika Islam dan politik orde lama melahirkan ragam wacana kompleks namun bisa ditegaskan bahwa problem utama terletak pada dimensi ideologis.[21] Demokrasi pada masa itu sudah menjadi sistem politik yang dibuktikan dengan agenda pemilu semenjak tahun 1955.[22]

Di samping itu, hubungan antara Islam dengan negara orde baru menggambarkan dinamika yang tidak sederhana. Problem ideologis yang diwariskan orde lama hampir berlanjut jika rezim orde baru tidak melakukan langkah tegas berupa penyederhanaan partai politik,[23] penggunaan pancasila sebagai asas tunggal bagi setiap organisasi massa Islam,[24] represifitas terhadap gerakan Islam politik,[25] peningkatan propaganda politik,[26] dan sebagainya.

Demand: *Revitalizing Representative Democracy Through Deliberative Elections* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2000)., Jan W. Van Deth, ed, *Private Groups and Public Life*: *Social Participation, Voluntary Association and Political Involvement in Representative Democracy* (London and New York: Routledge, 2005).

[20] Pemilu pasca orde baru, menurut Gaffar, juga menjadi arena atau medan kemunculan politisi-politisi baru di tingkat lokal yang mencalonkan sebagai anggota legislatif baik pusat, propinsi dan daerah. Fenomena tersebut menegaskan bahwa proses sirkulasi kekuasaan berjalan demikian menarik dan dinamis. Lihat, Syaukani, Ryas Rasyid, Affan Ghaffar, *Otonomi Daerah*...

[21] Lance Castle dan Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988).

[22] Ibid.

[23] Lihat, Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Partai Islam Era Reformasi* (Yogyakarta: AKA Group, 2004)., Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1987).

[24] Syafii Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995).

[25] M Rusli Karim, *Negara Dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

[26] Idi Subandi Ibrahim dan Yudi Latif, ed, *Bahasa dan Kekuasaan*: *Politik Wacana Di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa langkah tersebut secara umum, sebagaimana ditegaskan Karim, menggambarkan marginalisasi politik ummat Islam dalam negara orde baru.[27]

Kompleksitas dialektika Islam dengan demokrasi diatas menegaskan bahwa etika politik legislator menjadi bagian penting di dalamnya. Ini didasarkan bahwa berbagai varian yang meruanglingkupi dialektika antar keduanya tidak bisa dilepaskan dari aksi politik setiap aktor berlatarbelakang Islam dengan membawa beragam orientasi dan kepentingan politik. Setiap aktor berlatarbelakang Islam tersebut tersebar ke dalam berbagai kekuatan politik yang oleh Azra, sudah terjadi semenjak masa orde lama, orde baru dan pasca orde baru.[28]

Menurut Kuntowijoyo, pergumulan antara Islam dengan demokrasi orde baru direpresentasikan oleh kalangan kelas menengah muslim.[29] Identitas kelas menengah ini ditandai dengan pengalaman pendidikan di beberapa negara Barat yang oleh Malik, menandai fajar baru Islam Indonesia.[30] Sebagian dari pemikir muslim tersebut mengartikulasikan gagasan dan pemikiran secara variatif mengenai agenda besar yang harus dijalankan oleh ummat Islam Indonesia.[31]

Meski demikian, artikulasi ide dan gagasan tersebut lebih bersifat sosial dan kultural sehingga belum berpengaruh besar terhadap struktur kekuasaan masa itu. Sistem otoritarian-birokratik yang diterapkan orde baru menutup celah bagi fihak lain untuk melakukan fungsi kritis atas berbagai penyimpangan struktural. Meski

---

[27] Rusli Karim, *Negara Dan Peminggiran*...

[28] Menurut Azra, kompabilitas antara Islam dan demokrasi pasca orde baru sebagaimana pada masa sebelumnya tidak bisa mengabaikan teori jebakan demokrasi (democratic trap) yang terkadang membiasakan apakah demokrasi merupakan suatu proses atau tujuan. Yang pertama disebut demokrasi prosedural dan kedua disebut normatif. Lebih jauh, lihat, Azyumardi Azra,"Muslim Indonesia Menuju Konsolidasi Demokrasi" dalam Idris Taha, *Demokrasi Religius* (Jakarta: Teraju, 2005), xi-xxi.

[29] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*: *Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998).

[30] Dedy Jamaluddin Malik, *Zaman Baru Islam Indonesia* (Bandung: Penerbit Zaman, 1996)

[31] Lihat, Fachri Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*: *Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1986).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, sebagian kalangan Islam mempunyai tanggung-jawab moral untuk menjalankan fungsi kritis tersebut sampai pada lahirnya gerakan reformasi. Dalam wilayah struktural, kekuatan politik Islam yang direpresentasikan oleh partai Islam tidak memberikan dampak besar bagi perubahan sosial di masyarakat. Meski sebagai hasil fusi beberapa partai politik Islam orde lama, namun eksistensi partai tersebut tidak lepas dari intervensi rezim kekuasaan yang pada gilirannya berpengaruh pada aksi politiknya.[32]

Demokrasi terpimpin yang pernah dilakukan orde lama berpengaruh pada kebijakan politik orde baru sebagai langkah penting bagi perwujudan tertib politik (*political order*). Meski demikian, kemunculan gelombang demokrasi menjadi salah satu faktor runtuhnya rezim yang berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa tersebut. Semenjak itu dikenal dengan era reformasi berikut pembaruan kebijakan politik sesuai dengan semangat gelombang demokrasi.

Dialektika Islam dan negara era reformasi tidak lepas dari pemikiran dan aksi kalangan Islam melalui proses gerakan dan pemikiran baik pada wilayah ideologis, sosiologis dan politik. Pemikiran dan aksi tersebut direpresentasikan oleh aktor-aktor yang memposisikan Islam di samping sebagai sumber doktrin dan keyakinan juga sebagai identitas ideologis yang diartikulasikan dalam arena politik.[33] Identitas politik santri demikian menonjol dalam dua era sebelumnya.[34]

---

[32] Lihat, Donald K. Emerson, ed, *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia, 2001), 68.

[33] R. Michael Feener "Constructions of Religious Authority in Indonesian Islamism" dalam ed, Anthony Reid dan Michael Gilsenan, *Islamic Legitimacy in A Plural Asia* (London and New York: Routledge, 2007), 39.

[34] Istilah santri diambil dari tipologi Geertz untuk membedakan kaum abangan dan priyai. Meski demikian, istilah santri oleh Geertz menonjolkan sebagai identitas perilaku keagamaan masyarakat Mojokuto meski kemudian mengalami transformasi sebagai identitas politik. Konsep tentang identitas tersebut tidak bisa diresuksi hanya pada wilayah simbolisasi agama dalam ruang publik namun juga berangkat dari dimensi kesadaran religius yang bersifat laten. Kritik Bambang Pranowo atas tesis Geertz tersebut setelah meneliti perilaku kaum santri pada salah satu desa kelahirannya di Magelang. Bahwa artikulasi politik kaum santri tidak bisa direduksi hanya kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah santri sebagai identitas politik kalangan Islam juga menimbulkan pertaruhan di tengah rezim kekuasaan orde baru meski menurut Mulkhan, justru terjadi pergeseran yang ditandai dengan penerimaan pancasila sebagai asas tunggal pada satu sisi dan demokrasi pada sisi lain.[35] Meski demikian, identitas santri tersebut tetap tidak bisa dilepaskan dari fakta etis dan moral baik secara sosiologis maupun teologis.[36]

Dimensi sosiologis dan teologis dalam Islam sebagai sumber nilai-nilai moral dan etis harus menghadapi konsekwensi di tengah proses demokrasi politik yang memperlihatkan fenomena pergeseran agama dalam ruang publik. Pergeseran tersebut pada satu sisi dilatarbelakangi bahwa demokrasi politik merupakan arena dan ruang publik yang bersifat profan sehingga tidak bisa diintervensi oleh moral dan etika keagamaan. Sementara pada sisi lain, pergeseran tersebut secara subyektif mempertanyakan tentang makna moral dan etika dalam ruang publik. Pergeseran agama dari medan politik merupakan fenomena yang sering disebut dengan sekularisme dan sekularisasi.[37] Pergeseran agama dalam ruang publik merupakan implikasi yang ditimbulkan oleh jebakan demokrasi (*democratic trap*) yang dewasa ini memposisikan kebebasan individu secara mutlak sebagaimana doktrin demokrasi liberal.

Pada era orde baru, tema sekularisasi dan sekularisme pernah muncul kepermukaan namun lebih menitikberatkan pada simbolisasi agama dalam

---

partai politik Islam. Sebab realitasnya, makna santri tidak selalu melahirkan simbolisasi politik kepartaian yang tentu bukan sebagai identitas yang mutlak dilekatkan pada kalangan Islam. Lihat, Cliford Geertz, *Agama Jawa*: *Abangan Santri dan Priyayi* (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2013)., Bambang Pranowo. *Memahami Islam Jawa* (Jakarta: Alvabet, 2012).

[35] Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipress, 1996).

[36] Abdul Munir Mulkhan, *Moralitas Politik Santri* (Jakarta: Erlangga, 2003).

[37] Beberapa konsep yang terkandung dalam istilah sekularisme dan sekularisasi, lihat misalnya, Harvey Cox, *The Secular City* (New York: Collier Books, 1990).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan politik. Pertentangan simbolisasi Islam tersebut antara lain dilakukan oleh Nurcholish Madjid yang berakibat justifikasi sekularisasi dan sekularisme yang difahami sebagai bentuk pemisahan antara yang sakral dan yang profan.[38]

Padahal jika ditinjau lebih kritis, intervensi agama kedalam kehidupan politik tidak harus menggunakan simbolisasi agama berupa partai politik Islam,[39] namun lebih penting bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Islam kedalam kehidupan politik tersebut.[40] Dari sini kemudian melahirkan dua bentuk sekularisme; sekularisme obyektif dan sekularisme subyektif, istilah yang jauh sebelumnya diperkenalkan oleh Wahib.[41]

Representasi Islam ke dalam politik pasca orde baru tidak lagi mempertanyakan tentang simbolisasi agama yang pernah menjadi tema ketegangan antara Islam dan negara,[42] namun lebih utama justru mempertanyakan dimensi moral dan etika sebagai pijakan pemikiran dan aksi politiknya. Dimensi

---

[38] Lihat, Budhy Munawar Rahman, *Reorientasi Pembaruan Islam* (Jakarta: Paramadina, 2010), 326-365.

[39] Lihat, R. William Liddle, ed, *Memperbaiki Mutu Demokrasi Di Indonesia*: *Suatu Perdebatan* (Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2012), 3-44.

[40] Tentang gagasan atau pemikiran Cak Nur tentang agama dan politik, lihat misalnya, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008)., *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000).

[41] Lihat, Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam* (Jakarta: LP3ES, 1985). Menurut Eberle, teori sekularisasi tidak lepas dari gejala modernisasi sebagaimana terjadi di Barat. Dengan kata lain, modernisasi mengarah pada pasang surut peran agama baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam pikiran individu-individu. Sementara Robinson menggagas apa yang disebut sebagai "an atheist`s values" membuat distingsi antara *personal goods* yang meliputi kecantikan, kebenaran, berakal, cinta, kesadaran dan rasa beragama dan *political goods* meliputi negara, kesamaan, kebebasan, toleransi, perdamaian dan keadilan. Lihat, Christopher J. Emberle, *Religious Conviction in Liberal Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 23., Paul Cliteur, *The Secular Outlook*: *In Defense of Moral and Political Secularism* (Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2010), 46.

[42] Menurut Noorhaidi Hassan, represifitas politik orde baru tidak saja diarahkan pada partai politik Islam warisan orde lama namun juga terhadap berbagai gerakan Islam simbolis dan ideologis yang dinilai menjadi bagian bahaya laten orde baru. Dimata orde baru, setelah partai Masyumi bubar masih terjadi konsolidasi kekuatan Islam politik yang bercorak simbolis dan ideologis yang bersifat laten, terutama melalui kaderisasi diberbagai kampur perguruan tinggi negeri (PTN) umum. Lebih jauh, lihat Noorhaidi Hassan, *Laskar Jihad*: *Islam, Militansi dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2008)., Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy* (Singapore: ISEAS, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral dan etika tersebut secara sosiologis tidak saja menjadi unsur dalam ruang kesadaran subyektif dan intersubyektif, namun menjadi pijakan manifestasi politik baik dalam struktur kekuasaan maupun sosio-kultural dan keagamaan.

Desentralisasi pemerintahan daerah sebagai arena internalisasi nilai-nilai dan esensi demokrasi merupakan ruang mikro-politik yang menonjolkan distansi politik antara elit dengan masyarakat yang demikian dekat. Distansi rakyat dan negara tersebut mengharuskan bahwa struktur politik kekuasaan mengharuskan kedekatan dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat. Distansi struktur kekuasaan dengan kehidupan sosial menuntut pemahaman tentang bagaimana proses perjalanan interaksi politik legislator dengan masyarakat. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sistem demokrasi politik sebagai sarana ekspresi kedaulatan rakyat hanya mengandalkan komitmen dan konsistensi secara legal formalistik namun juga menuntut proses interaksi, komunikasi dan partisipasi demokratis melalui agenda kebijakan politik lokal.

Dari penegasan diatas maka signifikansi dan relevansi mengungkap etika politik legislator di lembaga legislatif daerah tidak saja didasarkan bahwa politik merupakan arena bebas nilai (*free value area*). Sebaliknya, relevansi dan signifikansi tersebut menitik beratkan bahwa legislator pasca orde baru, khususnya pada tingkat lokal, menjalankan proses politik dari bawah yang tidak bisa mengabaikan legitimasi sejarah politik Islam di Indonesia.

Meski demikian, legitimasi sejarah tersebut tidak terjebak pada dikotomi politik aliran dan ideologis, misalnya antara partai Islam dan di luar Islam. Legitimasi tersebut didasarkan bahwa Islam merupakan agama yang difahami aktor dengan beragam wajah (*multi-faces*). Beragam perspektif tersebut pada satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisi menonjolkan simbolisasi Islam demikian luas, meski pada sisi lain bersifat sebaliknya. Fenomena tersebut menegaskan bahwa hubungan antara Islam dan politik era reformasi menunjukan keberagaman luas baik dalam diri aktor maupun agen. Keberagamaan tersebut meniscayakan lahirnya kesinambungan dan pergeseran (*change and continuity*) sesuai dengan pemaknaan dan pemahaman etika dalam kehidupan politik.

Beberapa penjabaran di atas menegaskan bahwa kajian dan penelitian etika politik legislator daerah menitikberatkan pada bagaimana pemikiran dan aksi politik dilakukan baik pada arena sosio-kultural maupun struktural tingkat lokal. Dalam arena tersebut terjadi proses interaksi politik yang dilakukan legislator dengan masyarakat sebagai konstituen pada satu sisi dan dengan institusi elit lain di lembaga pemerintahan pada sisi lain. Problem struktur kekuasaan yang diperlihatkan dalam kerangka fungsi dan peran di atas meniscayakan pola dan model interaksi dengan berbagai fihak dalam dua arena tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Penelitian tentang etika politik anggota legislatif daerah Lamongan ini menitikberatkan pada konsepsi dan manifestasi etika politik legislator. Anggota legislatif tersebut menjabat pada periode 2009-2014. Anggota legislatif tersebut tersebar ke dalam semua kekuatan politik lokal yang berkompetisi dalam pemilu 2009. Penyebaran tersebut menegaskan bahwa terjadi pencairan ideologis dan politik identitas yang menjadi distingsi demokrasi politik pasca orde baru. Menuju kursi kekuasaan di lembaga legislatif daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang terdiri atas konsepsi dan manifestasi etika politik dengan merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat dalam struktur kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, identifikasi konsepsi dan manifestasi etika dimulai dari proses perjalanan politik setiap legislator tersebut yang berada dalam arena sosio-kultural dan struktural. Dua bentuk arena tersebut tidak difahami secara dikoromis namun berjalan secara dialektis. Sebab konsepsi etika lahir dari proses perilaku dan tindakan politik, sementara konsepsi etika tersebut menuntut manifestasi kembali dalam arena politik. Arena politik tersebut berupa ruang publik sosial-kultural pada satu sisi dan struktural pada sisi lain. Konsepsi etika politik yang diproduksi setiap legislator tersebut lahir dari proses perilaku dan tindakan politik yang dimanifestasikan kembali dalam arena politik tersebut.

C. Rumusan Masalah.

Etika politik sebagai fokus utama kajian ini berangkat dari konsepsi dan manifestasi politik yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah Lamongan periode 2009 – 2014. Dengan demikian terdapat dua bentuk pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana konsepsi etika politik legislator muslim di lembaga legislatif daerah Lamongan di era demokrasi lokal?. Pertanyaan ini memfokuskan pada pembentukan konsepsi etika politik anggota legislatif daerah Lamongan tersebut. Konsepsi etika politik tersebut merupakan produk konseptualisasi atas praktek dan tindakan politik menujur struktur kekuasaan, yakni menjadi anggota legislatif daerah.

2. Bagaimana manifestasi etika politik legislator muslim di lembaga legislatif daerah Lamongan di era demokrasi lokal? Pertanyaan ini memfokuskan pada manifestasi etika politik dalam struktur kekuasaan, yakni di lembaga legislatif daerah Lamongan. Manifestasi etika politik ini sebagai pengejawantahan dari konsepsi etika politik yang sudah terbentuk sebelumnya. Meski demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manifestasi etika politik disini dibatasi pada fungsi dan peran sebagai anggota legislatif daerah. Fungsi dan peran tersebut tidak saja bersifat struktural namun juga bersifat sosio-kultural. Peran struktural terdiri atas fungsi legislasi, penyusunan anggaran dan pengawasan. Sementara peran sosial dan kultural menitikberatkan pada fungsi partisipasi dan komunikasi politik. Meski demikian, fungsi partisipasi dan komunikasi politik tersebut juga merupakan keharusan dalam peran struktural.

Gambar. 1.1.
Rumusan Masalah Penelitian

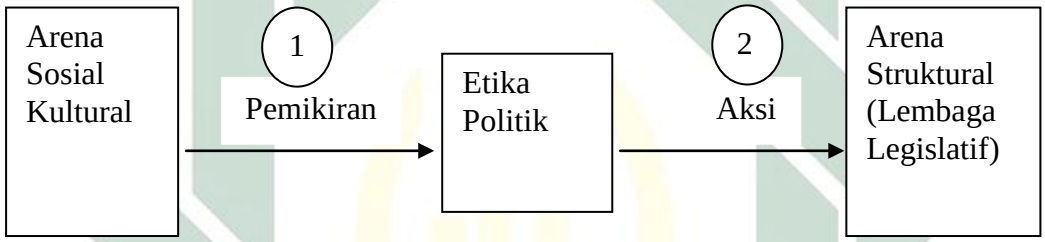

D. Tujuan Penelitian.

Berangkat dari dua pertanyaan penelitian diatas maka terdapat dua tujuan tujuan penelitian ini.

1.Memahami konsepsi etika politik anggota legislatif daerah Lamongan periode 2009-2014. Konsepsi etika politik tersebut merupakan produk dari praktek dan tindakan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif tersebut semenjak diberlakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan di kabupaten Lamongan pada tahun 2000. Konsepsi etika termaksud sebagai konseptualisasi dari proses interaksi dan praktek politik yang menjadi landasan menuju struktur kekuasaan di lembaga legislatif daerah..

2.Memahami manifestasi etika politik anggota legislatif daerah Lamongan periode 2009-2014. Manifestasi etika politik merupakan bentuk perwujudan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsi etika politik di atas yang secara spesifik terjadi di lembaga legislatif daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lembaga tersebut. Jika konsepsi etika politik merupakan produk konseptualisasi menuju struktur kekuasaan di lembaga legislatif daerah maka manifestasi ini merupakan perwujudan dari konsepsi etika di lembaga legislatif daerah.

E. Manfaat Penelitian.

Penelitian tentang etika politik legislator pada era demokrasi lokal mengandung signifikansi dan relevansi semenjak diberlakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan yang disebut dengan otonomi daerah. Kebijakan tersebut menuntut penguatan kapasitas (*capacity building*) pemerintah daerah di bidang demokrasi sebagai unsur utama proses pelaksanaan kebijakan publik.

Meski demikian, realitas tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan harapan publik yang pada satu sisi masih memperlihatkan optimisme politik namun pada sisi lain justru sebaliknya. Legislator merupakan salah satu kekuatan di lembaga legislatif yang dengan fungsi dan peran yang dimiliki berpengaruh kuat bagi proses kebijakan publik tersebut.

Disamping itu, lahirnya berbagai persepsi, baik positif atau negatif, atas perilaku anggota legislatif di daerah semakin mempertebal optimisme dan pesimisme politik tersebut. Dengan demikian penelitian tentang etika politik di atas justru berupaya mengetahui tentang etika politik anggota legislatif baik pada tingkat pemikiran maupun aksi. Penelitian ini diharapkan mengandung asas manfaat sebagai berikut.

1.Manfaat praktis. Manfaat praktis menitikberatkan bahwa konsepsi dan manifestasi politik legislator muslim memberikan deskripsi penting bagi proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan politik di negeri ini. Hal ini disadari bahwa perkembangan demokrasi lokal memperlihatkan dinamika progresif yang tidak bisa di lepaskan dari fenomena demokrasi liberal yang sejauh ini merambah ke setiap daerah di Indonesia. Demokrasi liberal tidak sekedar memposisikan legislator sebagai representasi kepentingan dan orientasi politik normatif. Namun lebih jauh menggambarkan fenomena pergeseran etis dan moralitas politik dengan menonjolkan kepentingan pragmatis.

2.Manfaat akademis. Dalam penelitian ini, manfaat akademis yang bisa di harapkan berupa pengembangan pemikiran politik Islam era demokrasi lokal yang muncul semenjak di berlakukan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan mulai tahun 2000. Pengembangan pemikiran politik Islam era kontemporer tidak sekedar mempertahankan kemapanan konsepsi dan teori politik Islam klasik namun bagaimana terjadi dialektika dengan fenomena dan realitas politik kontemporer sebagai keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Di samping itu, manfaat yang di ambil dari penelitian ini berkaitan dengan budaya politik lokal bahwa bentuk konsepsi dan manifestasi etika politik tidak bisa secara absolut mengandalkan produk aturan juridis-normatif dalam arena struktur kekuasaan. Namun lebih jauh menempatkan individu atau aktor sebagai pusat lahirnya konsepsi dan aksi politik yang dijalankan baik dalam arena struktur kekuasaan pada satu sisi maupun sosio-kultural pada sisi lain.

Dalam perspektif budaya politik, bentuk pemikiran dan aksi politik tidak lepas dari esensi dan substansi nilai-nilai dan orientasi tertentu. Pemahaman moralitas politik praktis merupakan langkah teoritisasi dan konseptualisasi atas etika politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontemporer dengan memfungsikan perspektif sosiologis yang menonjolkan pada model interaksi legislator tersebut baik secara struktural maupun sosio-kultural. Konseptualisasi dan teoritisasi etika dari moralitas politik praktis yang tercermin dari pemikiran dan aksi politik tersebut menjadi temuan akademis yang diharapkan dari penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu.

Terdapat beberapa hasil penelitian dan kajian yang dinilai berkaitan baik secara implisit maupun eksplisit terhadap topik etika dan moralitas. Beberapa kajian termaksud adalah sebagai berikut;

1.Konsep Etika al-Mawardi oleh Muhammad Nu`man merupakan disertasi yang berhasil dipertahankan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2006 lalu. Penelitian ini mengambil obyek ide atau gagasan dan pemikiran tentang etika al-Mawardi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma rasionalistik yang menurutnya, identik dengan *verstehen* yang memandang realitas sebagaimana difahami oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang ada dan kemudian di dialogkan dengan pemahaman subyek atau data yang diteliti.

Dalam penelitian ini juga ditegaskan tentang hakekat manusia dan moralitas. Dalam pembahasan tentang manusia, al-Mawardi menegaskan bahwa Allah Maha Tinggi dengan segala hikmah-Nya menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya dan menciptakan manusia dengan segala ketentuan-Nya.

Di samping itu, Tuhan menciptakan manusia dengan sifat kelembutan dan keindahan-Nya menjadi makhluk yang memiliki kekurangan dan kelemahan namun memiliki keunggulan berupa akal. Manusia diciptakan Tuhan terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua unsur; jasmani dan ruhani. Di samping itu, manusia menurut al-Mawardi merupakan makhluk sosial yang mempunyai tabiat untuk membutuhkan orang lain.

Meski manusia terdiri dari jasmani dan ruhani, namun diantara dua unsur tersebut yang paling penting adalah ruhani sebab ia berasal dari ruh Tuhan. Sebagai ruh Tuhan, ia tidak bisa diketahui oleh manusia yang lain karena menjadi rahasia Tuhan. Dan ruh ini tidak akan pernah musnah meski jasad mengalami kemusnahan. Dari sini maka al-Mawardi menilai bahwa jiwa dalam diri manusia merupakan hal paling utama dan esensial jika dibandingkan jasad yang membungkus jiwa tersebut. Pandangan di atas sejalan dengan pemikiran Plato yang menilai bahwa badan merupakan penjara bagi jiwa. Dengan demikian jiwa harus melepaskan diri dari jebakan jasad agar dapat memperoleh kesempurnaan melalui pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan akal.

Di samping itu, manusia menurut al-Mawardi merupakan makhluk yang dinamis dalam jiwanya di mana terjadi pertarungan antara hawa nafsu yang cenderung pada kejahatan melawan akal yang cenderung pada kesempurnaan. Di samping itu, manusia merupakan makhluk yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga dengan demikian, manusia merupakan makhluk moral disamping makhluk yang bebas menentukan mana yang baik dan buruk.[43]

Dalam menyangkut keutamaan moral, al-Mawardi mengambil posisi yang disebut sebagai doktrin jalan tengah yang dalam istilah Inggris disebut dengan the Golden mean atau the doctrine of the Mean di mana beberapa filosof; Plato, Aristotelles, al-Kindi, Ibn Sina, Ibn Miskawaih juga menggunakan faham ini.

---

[43] Muhammad Nu`man, ”*Konsep Etika al-Mawardi*” (Disertasi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 67-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Doktrin jalan tengah ini mengandung pengertian tentang keseimbangan, moderat, utama dan mulia. Lebih jauh, keutamaan etika secara umum diartikan sebagai posisi tengah antara ekstrim berlebihan dengan ekstrim kekurangan.

Dari penegasan di atas maka menurut al-Mawardi bahwa setiap keutamaan mempunyai dua ekstrim di mana yang tengah adalah yang terpuji sementara yang ekstrim adalah tercela. Keutamaan itu adalah pertengahan antara dua perbuatan, misalnya kebijaksanaan adalah pertengahan antara kejahatan dan kebodohan. Keberanian adalah pertengahan antara nekat dan pengecut. Menahan diri adalah pertengahan antara tamak dan kelemahan keinginan dan sebagainya. Al-Mawardi juga sependapat dengan Plato bahwa keutamaan itu dapat dibagi menjadi empat bagian besar yang menjadi ibu dari segala bentuk perangai yang utama; Pertama, menjaga diri agar tidak mengerjakan perbuatan salah. Kedua, berani menegakan kebenaran. Ketiga, mengetahui rahasia hidup melalui pengalaman. Keempat, sederhana dalam segala perkara.[44]

2.Islam dan Demokrasi: Studi Perbandingan antara Nilai-nilai Universal Demokrasi Barat dengan Demokrasi Islam oleh Hatamar. Karya ini merupakan disertasi yang berhasil dipertahankan di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis-teoritis. Pendekatan tersebut difungsikan untuk menjelaskan eksistensi nilai-nilai universal dalam gagasan atau ide demokrasi sebagai sistem sosial, pemerintahan dan politik. Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap pemikiran para filosof muslim yang terdapat dalam berbagai literatur keislaman.

[44] Ibid, 109-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian ini, terdapat aspek menarik mennyangkut nilai-nilai universal demokrasi yang terdapat dalam doktrin Islam. Aspek ini menegaskan bahwa sebenarnya banyak terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam wahyu yang mempunyai kesesuaian dengan demokrasi. Sementara sebagian kalangan muslim di Indonesia sejauh ini lebih memposisikan dokrin demokrasi secara kritis dan konfrontatif tanpa secara terbuka melakukan kompabilitas baik secara teoritis maupun filosofis dengan doktrin Islam sebagaimana dilakukan oleh Hatamar ini. Dengan kata lain, mendahulukan sikap konfrontatif ketimbang argumentatif, merupakan distingsi yang nampak di sebagian kalangan muslim di Indonesia, terutama yang selama ini berpegang tentang inkompabilitas antara Islam dengan demokrasi tersebut.

Fenomena ini secara sosiologis mengakibatkan lahirnya citra negatif terutama ketika dimanifestasikan ke dalam berbagai perilaku dan tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian kelompok Islam di Indonesia terutama terhadap institusi-institusi demokratis. [45]Nilai-nilai persamaan sebagai prinsip demokrasi dalam al-Qur`an juga menduduki peran penting, terutama dalam konteks politik..[46]

---

[45] Dimulai dengan relasi antara Islam dengan nilai-nilai kebebasan misalnya, Hatamar menegaskan bahwa konsep kebebasan memang tidak terdapat dalam al-Qur`an. Konsep kebebasan tersebut merujuk pada karya Jane Merrit al-Yacoubi, *A Comparative Analysis of Islamic and Western Democratic Political Thought* yang juga merupakan disertasi di University of Colorado, Amerika Serikat. Lebih jauh, meski konsep kebebasan tersebut tidak ditemukan dalam wahyu namun bukan berarti secara eksplisit tidak menyinggung konsep kebebasan tersebut. Dengan menafsirkan salah satu ayat, QS: al-Isra` ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” maka Hatamar menegaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna dan konsep tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.Politik Islam di Indonesia: Kajian Tentang Partai Masyumi oleh H.D. Silahuddin. Karya ini merupakan tesis yang dipertahankan di Program Studi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian ini menitikberatkan pada Masyumi sebagai partai politik Islam dalam pemerintahan orde lama. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan, sementara perspektif teori yang digunakan memadukan pendekatan ilmu ketatanegaraan pada satu sisi dan fiqih siyasah pada sisi lain. Kedua bentuk pendekatan tersebut bersifat integratif. Sebagai partai politik Islam orde lama, Masyumi dinilai mempunyai gagasan dan pemikiran tentang etika politik yang disebut dengan moralitas agama.

Menurut Silahuddin, apa yang disebut sebagai akhlak mulia menjadi landasan partai tersebut dalam mewarnai konstruksi dan struktur politik nasional pada masa itu. Gagasan moralitas tersebut yang mendorong partai Islam ini untuk

---

kebebasan. Sebab perbuatan pembunuh atau menghilangkan nyawa individu merupakan bentuk pembunuhan dan perampasan hak individu untuk hidup. Disamping ayat di atas, terdapat ayat lain yang menegaskan tentang kebebasan, terutama berkaitan dengan kebebasan beragama. Dalam kitab suci ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, menunjukan tentang makna konsep kebebasan termaksud. Lihat, Hatamar, "*Islam dan Demokrasi*: *Studi Perbandingan Antara Nilai-nilai Universal Demokrasi Barat dengan Demokrasi Islam*" (Disertasi- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), 160-163.

[46] Disini Hatamar mengutip pernyataan Fahmi Huwaydi yang menegaskan bahwa nilai-nilai persamaan tersebut dapat ditelusuri hingga dalam sejarah nenek moyang manusia yang asalnya adalah satu jiwa sebagaimana termaktub dalam al-Qur`an, yakni QS: an-Nisa` ayat 1.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". Lihat, Ibid, 186-187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjuangkan ide mengenai negara Islam dalam majelis Konstituante untuk mewujudkan visi dan misi partai tersebut; terbentuknya negara yang baik dan penuh dengan ampunan Tuhan. Visi negara yang baik ditandai dengan masyarakat yang berakhlaq mulia dan berkepribadian tinggi sebagaimana tercermin dalam diri nabi Muhammad.[47]

4.Etika Politik: Studi Pemikiran Ibn Taimiyah oleh Dedi Syaputra. Karya ini merupakan tesis yang dipertahankan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Kajian ini menitikberatkan pada pemikiran Ibn Taimiyah di tengah problem etis yang terjadi dalam arena struktur kekuasaan. Dalam kerangka teoritiknya, agama diposisikan sebagai institusi moral yang bersifat preskriptif bagi penganutnya. Dari sini maka ajaran agama menjadi dasar moralitas yang juga disebut dengan etika religius. Karakter ide-ide moral berdasarkan agama menyangkut makna kebenaran lebih didasarkan pada parameter keimanan dan bukan berdasarkan pada argumentasi logis maupun rasional yang dapat dikuantifikasi melalui metode ilmiah.

Dengan memposisikan keimanan dalam Islam sebagai landasan etis dan moral tersebut, Dedi Syaputra menggunakan perspektif Huns Kung ketika mengutip ajaran Islam sebagai landasan etis, bahwa tak seorang pun di antara kamu yang beriman sepanjang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Di samping itu, mengutip pendapat Zainal Abidin Ahmad bahwa hubungan antara moral dan politik ternyata tidak dapat dipisahkan sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Ghazali sejalan dengan Plato dan Aristotelles. Moral

[47] H.D. Silahuddin, *"Politik Islam di Indonesia: Kajian Tentang Partai Masyumi"* (Tesis-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan nilai baik dan buruk dari setiap tindakan maupun hasrat dan keinginan masyarakat, sementara politik sebagai otoritas kekuasaan harus difungsikan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral. Kesimpulan dari kajian ini bahwa Ibn Taimiyah ingin mengembalikan konsep dasar etika politik baik dari pemerintah maupun institusi hukum pada ide dasar yang terkandung dalam al-Qur`an dan Hadits di mana secara impresif Ibn Taimiyah menegakan syariat Islam.

Lebih jauh, Ibn Taimiyah juga memposisikan ruang publik yang berakar dari orientasi publik yang bersifat kolektif. Menurut Ibn Taimiyah, manusia membutuhkan ruang gerak dan kebebasan yang mencakup kehendak dan tuntutan yang berada dalam diri manusia termaksud. Negara mempunyai tugas memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Di samping itu, konsep amanah juga menjadi perhatian utama dalam pemikiran Ibn Taimiyah ini. Menurutnya, amanat kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran melalui lembaga-lembaga politik di dalamnya. [48]

5.Etika Politik Dalam Pandangan al-Ghazali oleh Husni Mubarok. Kajian ini merupakan skripsi yang dipertahankan di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Kajian ini juga dilatarbelakangi oleh realitas politik berikut posisi moral dan etika di dalamnya. Menurut Husni Mubarok, orientasi kepentingan pragmatis yang dilakukan oleh aktor politik di berbagai institusi kekuasaan merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Marginalisasi etika dan moralitas berujung pada penghalalan segala cara yang tercermin dalam pemikiran

[48] Dedi Syaputra, *"Etika Politik*: *Studi Pemikiran Ibn Taimiyah Dalam Kitab al-Siyasah al-Syariah fi Ishlah al-Ra`i wa al-Ra`iyah"* (Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perilaku politik. Dengan mengungkap pemikiran al-Ghazali, penulis skripsi ini menjabarkan beberapa pemikiran etika politik al-Ghazali.

Menurut al-Ghazali, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa keberadaan orang lain. Terdapat dua faktor mengapa manusia menjadi makhluk sosial, yakni kebutuhan akan keturunan bagi survivalitas kehidupannya dan saling membantu dalam penyediaan kebutuhan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut maka diperlukan pembagian tugas antar manusia baik sebagai rakyat maupun penguasa.

Dalam menunjang proses tersebut maka diperlukan apa yang disebut sebagai negara guna menjaga dan menjalankan ajaran agama yang kokoh. Metode yang digunakan dalam kajian ini meliputi; obyek formal berupa pemikiran al-Ghazali dan obyek material adalah tentang etika politik al-Ghazali. Kesimpulan kajian ini bahwa konsep etika politik menurut al-Ghazali adalah negara yang terdiri atas aparatur negara dan masyarakat yang mempunyai keselarasan antar unsur sehingga membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang adil dan makmur yang bersendikan moral agama. Pemimpin, menurut al-Ghazali, harus mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika yang dimanifestasikan dalam menjalankan sistem pemerintahan. [49]

6. Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik oleh Lely Arrianie. Penelitian ini pada mulanya merupakan disertasi di Universitas Padjajaran Bandung. [50] penelitian ini mengambil obyek material dan formal tentang komunikasi politik legislator pusat di Senayan.

---

[49] Husni Mubarok, "*Etika Politik Dalam Pandangan al-Ghazali*: *Kajian Atas Kitab al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk*" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).
[50] Lely Arrianie, *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik* (Bandung: Penerbit Wdya Padjajaran, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menggunakan perspektif dramaturgis-nya Erving Goffman, diperoleh gambaran tentang interaksi dan komunikasi politik yang dilakukan oleh elit politik Senayan tersebut. Konsep panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*) menurut peneliti bersifat ambivalen. Konsep tersebut menampakan perbedaan antara satu politisi dengan politisi lainnya. Disamping itu, panggung politik merupakan arena dan medan bagi pembentukan kesan (*impression management*) bagi khalayak. Dalam membangun kesan tersebut, setiap aktor di lembaga legislatif mempunyai dinamika yang unik dan menarik. Fenomena ini menegaskan bahwa komunikasi politik elit kekuasaan tidak bersifat linear namun bersifat sirkular. Panggung politik berikut permainan dramaturgis tersebut, menurut peneliti, akan selalu muncul dan terjadi. [51]

Beberapa kajian terdahulu diatas masih membuka ruang dan celah bagi penelitian etika politik ini. Penelitian yang dilakukan Muhammad Nu`man misalnya mengambil obyek material dan formal pemikiran etika Ibn Miskawayh. Penelitian ini menggali beberapa ajaran etis dan moral salah seorang ulama Islam klasik. Dengan kata lain, penelitian ini lebih bersifat normatif ketimbang empiris. Demikian halnya dengan penelitian Hatamar yang bersifat filosofis-teoritik dengan mengambil obyek material-formal tentang konsepsi etika menurut Islam dan Barat. Penelitian HD. Silahuddin yang mengambil obyek material-formal pemikiran politik partai Masyumi; sebuah partai politik Islam era orde lama juga belum menyinggung problema politik Islam kontemporer.

Meski demikian, kajian tentang partai Masyumi ini tidak lepas sebagai rangkaian pemikiran politik Islam yang secara minimal maupun maksimal

[51] Ibid, 240-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi semangat ideologis sebagian politisi muslim pasca orde baru. Penelitian Dedi Syaputra dan Husni Mubarak secara impresif tidak berbeda jauh dengan penelitian Muhammad Nu`man, yakni menggali pemikiran etika ulama Islam klasik sehingga tidak menyinggung arena politik yang bersifat empiris terutama pelembagaan etika baik secara konsepsional maupun aktual di lembaga legislatif.

Meski secara implisit tidak mengambil obyek material dan formal tentang etika politik, penelitian Lely Arrianie tentang komunikasi politik patut menjadi pertimbangan. Dengan mengangkat topik politisi dan pencitraan di panggung politik oleh legislator pusat di Senayan menghasilkan kesimpulan menarik bahwa terjadi permainan drama politik dalam panggung depan dan panggung belakang. Bentuk pencitraan di lembaga tersebut diartikulasikan dalam berbagai agenda politik yang seakan memperjuangkan kepentingan rakyat, sementara pada sisi lain justru menampakan fenomena inkonsistensi perjuangan kepentingan rakyat.

Meski demikian, penelitian ini tidak mengambil kesimpulan secara justifikatif tentang perilaku elit politik di lembaga legislatif sehingga masih memberikan ruang bagi kajian ini meski lebih bersifat lokalistik. Pendekatan dramaturgis difungsikan untuk mendeskripsikan bagaimana elit tersebut membangun kesan (*impression management*) melalui dua panggung yang ditegaskan sebelumnya. Pembagian dua panggung tersebut disamping bersifat interaksional juga didasarkan pada pembentukan kesan melalui narasi dan bahasa politik.

G. Metodologi.

1.Paradigma Penelitian.

Penelitian etika politik legislator di lembaga legislatif Lamongan ini mengacu pada paradigma strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paradigma ini bertolak dari kecenderungan teori-teori sosial yang pada satu sisi terjebak pada fundamentalisme subyektif dan pada sisi lain fundamentalisme obyektif.[52]

Relevansi paradigma strukturasi dalam penelitian ini bahwa subyek atau aktor yang disebut sebagai agen merupakan individu yang hidup dalam jejaring struktur sosial, kultural dan politik. Dialektika subyek dalam struktur tersebut tidak mengarahpada kehendak dan kesadaran subyektif atau intersubyektif secara ekstrim namun mempertimbangkan realitas struktur sosial, kultural dan politik. Dialektika antara agen dengan struktur tersebut melahirkan apa yang disebut Giddens sebagai dualitas struktural. Dualitas struktural tersebut berada dalam posisi tengah antara fundamentalisme obyektif dan fundamentalisme subyektif.

a. Pendekatan Kajian.

Etika politik dalam kajian ini menitikberatkan pada konseptualisasi etika terhadap pemikiran dan aksi politik dalam arena sosio-kultural dan struktur kekuasaan. Legislator muslim dalam penelitian ini merupakan individu anggota legislatif yang beragama Islam, meski tidak bisa dipungkiri bahwa semua anggota legislatif daerah Lamongan berlatarbelakang Islam. Legislator muslim merupakan subyek kajian sehingga diperlukan pendekatan untuk memperoleh deskripsi tentang orientasi dan nilai-nilai dari pemikiran dan aksi politik yang dijalankan.

Legislator muslim di sini merupakan individu politisi di mana pemikiran dan aksi politik merupakan dimensi manifestasi yang tidak lepas dari unsur laten, yakni kesadaran dan pemahaman dari dunia kehidupannya. Pendekatan budaya dalam teori dan konsepsi politik konvensional didefinisikan sebagai sistem nilai

[52] Kecenderungan tersebut diklasifikasikan oleh Ritzer sebagai ilmu yang berparadigma ganda, yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku sosial. Lihat, George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Menurut Verba, budaya politik adalah sistem kepercayaan empiris, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan tentang bagaimana tindakan politik tersebut dilakukan. [53]

Di Indonesia, menurut Feith, terdapat dua budaya politik yang dominan, yakni aristokrasi Jawa dan wiraswasta Islam. Sementara menurut Geertz sebagaimana dikutip oleh Marijan dan Lee, terdapat tiga kekuatan yang sejauh ini masih menjadi identitas aktor politik baik dalam konteks nasional maupun lokal, yakni santri, priyai dan abangan. [54] Trikotomi Geertz tersebut sejalan dengan pandangan Elisabeth bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia, diversitas Islam tidak saja mencakup perbedaan penafsiran atas al-Qur`an namun juga asimilasi antara Islam dengan budaya lokal. Komunitas-komunitas muslim ditempat lain menggambarkan bahwa Islam selalu mempunyai warna dari tradisi dan budaya lokal. [55]

Di samping itu, aktor yang dipresentasikan dalam kajian ini jika menggunakan terminologi Geertz tersebut lebih mengarah pada kelompok santri yang dideskripsikan sebagai politisi atau legislator muslim. Dalam budaya politik diatas, terdapat komponen pendekatan yang difungsikan untuk memahami tentang bagaimana mengartikulasikan nilai, sikap dan orientasi politiknya.[56] Lebih jauh,

---

[53] Lihat, Gabriel Abraham Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture*: *Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (London: Sage Publications, 1989).

[54] Kacung Marijan, "The Study of Political Culture In Indonesia", dalam Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Tahun xii, no. 2, April 1999, 57-66. Mei. H. Lee, "Does A Country`s Politics Reflect the Design of its Culture? The Case of Indonesia", dalam *Taiwan International Studies Quarterly*, Vol. 3. No. 1. 2007, 99-121.

[55] Lihat, Adriana Elisabeth, "The Indonesian Experience in Implementing Democracy", dalam ed, Zoya Hassan, *Democracy in Muslim Societies*: *The Asian Experiences* (California: Sage Publications, 2007), 77.

[56] Menurut Lasswell, sebagaimana dikutip Almond dan Verba bahwa terdapat karakter personal dalam diri individu demokratis. Pertama, an open ego, yakni sikap keterbukaan diri pada yang lain. Kedua, a capacity for sharing values with others, yakni kapasitas atau kemampuan untuk berbagi nilai-nilai dengan yang lain. Ketiga, a multivalued rather than a single-valued orientation, yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya politik tersebut dapat didekati dengan penggunaan kerangka konseptual antropologi, sosiologi dan psikologi sebagaimana Lasswell diatas. [57]

Menurut Jonathan Friedman, konsep budaya politik mengharuskan situasi sosial dan hubungan kekuasaan dan otoritas partikular sesuai dengan tempat dimana budaya tersebut diproduksi dan direproduksi. Terdapat definisi dan konsepsi budaya yang dikembangkan Jonathan Friedman dari Fredrik Barth, bahwa makna budaya tidak terdistribusikan secara merata dalam populasi sekaligus tidak menghasilkan kerangka paradigma bersama. Konteks reproduksi budaya dihasilkan dari berbagai suara atau kehendak yang muncul di masyarakat dan ditempatkan sesuai dengan relasi kekuasaan dan otoritas di mana muncul koherensi ketika makna yang diatribusikan dapat dipertahankan secara hegemonik. Budaya secara relatif merupakan produk praktek makna, tentang tindakan ganda yang disituasikan secara sosial berikut penyebaran pengertian terhadap dunia, tentang bermacam penafsiran baik antara anggota dalam satu masyarakat maupun anggota lintas masyarakat.

Dengan demikian, definisi budaya bukan bersifat monolitik sebagai obyek hubungan dan perkembangan sosio-historis yang bersifat independen. Sebaliknya, budaya direproduksi sesuai dengan konteks sosial dan politik sebagai suatu proses yang dikondisikan oleh adanya relasi kekuasaan dan struktur dominan sesuai dengan aksi dan aspirasi aktor yang turut serta dan terlibat dalam proses

---

orientasi nilai yang bersifat variatif daripada tunggal. Keempat, trust and confidence in human environment, yakni menjaga kepercayaan dalam lingkungan kehidupan sosial dan kultural. Kelima, relative freedom from anxiety. Lihat, Gabriel Abraham Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture*, 9-10. Irman G. Lanti, "Back to the Nature: Continuity and Change in Indonesian Politics", dalam *ISEAS Visiting Research Series*, April 2001. Saiful Mujani, *Religious Democrats*: *Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia* (Disertasi-Ohio State University, New York, 2003), 3-4.

[57] Gabriel Abraham Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[58] Menurut Budihardjo, budaya politik merupakan satu dari empat variabel yang mencakup kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan dan budaya politik itu sendiri. Budaya politik menurut Beer dan Ulam, sebagaimana dikutip Budihardjo adalah orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik. [59]

Proses demokrasi liberal berpengaruh atas budaya politik yang pada satu sisi menimbulkan pergeseran dan pada sisi lain berdasarkan sistem kepercayaan (*trust*). Gaya politik (*political style*) merupakan bagian dari manifestasi budaya politik di tengah arus demokrasi liberal tersebut. Terdapat dua dimensi konseptual mengenai gaya politik tersebut. Pertama, gaya politik tersebut direpresentasikan melalui tingkat mediasi dan negosiasi dengan kekuatan kapitalisme yang bernaung dalam korporatisme demokratis mencakup hubungan atau bentuk kerjasama yang didasarkan konsensus dalam menjalankan politik ekonomi. Kedua, gaya politik yang direpresentasikan sesuai dengan warisan liberalisme sosio-kultural sebagaimana terdapat dalam masyarakat Barat. [60]

Dari konsep gaya politik ini, maka institusi parlemen merupakan adopsi demokrasi Barat namun dalam konteks budaya politik difahami secara berbeda-beda oleh masyarakat. Menurut Anthony Cohen, masyarakat selalu mengimpor ide struktural di luar batas budaya mereka sendiri namun mewujudkan dan menjalankan institusi tersebut tidak lepas dari konsepsi makna yang mereka fahami dan digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan simboliknya. [61]

---

[58] Lihat, Stefan Eklof, *Power and Political Culture in Suharto`s Indonesia* (Copenhagen: NIAS Press, 2003), 7.
[59] Lihat, Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 59.
[60] Volker Bornschier, *Culture and Politics in Economic Development* (London and New York: Routledge, 2005), 133.
[61] James Alexander, *Political Culture in Post-Communist Russia* (New York: Saint Martin`s Press, 2000), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjabaran di atas maka kajian etika politik anggota legislatif daerah ini menggunakan pendekatan budaya politik yang meski pada satu sisi mencakup beberapa konsepsi di atas juga menekankan pada institusi kelembagaan legislatif bersangkutan. Namun demikian, institusi legislatif yang mencakup otoritas atau kewenangan lebih bersifat deskriptif dari pada juridis. Fungsi dan otoritas tersebut tidak secara mutlak mendasarkan pada naskah hukum dan perundang-undangan sebagaimana terjadi pada abad ke-19. Sebaliknya, kajian ini menitikberatkan pada esensi politik sebagai kekuasaan dalam menentukan kebijakan publik. Dengan demikian politik difahami hanya sebagai proses atau kegiatan. Pandangan ini lebih dekat pada mazhab Chicago yang dipelopori oleh Lasswell dan Charles E. Meriam sebagaimana ditegaskan di atas. [62]

b. Perspektif Teori.

Legislator muslim sebagai subyek penelitian ini merupakan individu politisi anggota lembaga legislatif daerah. Pada satu sisi, kapasitas diri tersebut bersifat struktural dan fungsional berupa peran dan fungsi yang melekat dalam institusi kekuasaan tersebut. Sementara pada sisi lain merupakan individu atau agen yang hidup dalam struktur sosio-kultural yang memperlihatkan beragam fenomena dari proses interaksi yang bersifat simbolis. Meski demikian, identifikasi dua model arena dan medan tersebut tidak bersifat dikotomis. Politisi legislator muslim merupakan agen atau representator yang berada dalam jaringan kekuasaan baik bersifat struktural maupun kultural. [63]

---

[62] Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu*, 73.

[63] Menurut March dan Olsen, institusi politik juga merupakan pendekatan umum berupa seperangkat ide-ide teoritis dan hipotesis yang berkaitan dengan hubungan antara karakter institusi dengan agen politik, penampilan dan perubahan. Institusionalisme menekankan pada bentuk alami dan konstruksi sosial dari institusi politik. Meski demikian, dalam institusi tersebut juga terdapat otonomi individu yang bisa di fahami dalam dua perspektif, yakni, Pertama, perspektif aktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etika politik legislator merupakan dimensi dalam diri setiap legislator muslim tersebut yang pada satu sisi berupa kesadaran laten sementara pada sisi lain dimanifestasikan dalam jejaring sosio – kultural dan struktural. Meski demikian, dimensi etika politik legislator muslim tersebut tidak difahami semata sebagai aspek kesadaran laten tanpa manifestasi atau sebaliknya, namun justru difahami bahwa dimensi etika politik tersebut merupakan hasil dari proses interaksi dalam struktur yang meruanglingkupi baik sosial – kultural maupun institusional – struktural.

Pandangan di atas sejalan dengan yang ditegaskan oleh Shomali bahwa etika tidak sebatas pada ide atau gagasan abstrak yang bersifat filosofis (metaetika) namun sebagai prinsip dan sistem nilai yang dihasilkan dari interaksi pemikiran dan tindakan.[64] Jika prinsip dan sistem nilai tersebut berupa ide dan gagasan abstrak maka bagaimana posisinya dalam aksi politik yang bersifat empiris dan demikian sebaliknya.

Dari penjabaran di atas maka teori strukturasi Giddens difungsikan sebagai perspektif teori untuk memahami pemikiran dan manifestasi politik legislator muslim tersebut. Pemikiran etika politik merupakan sistem nilai, prinsip dan juga

---

rasional; yang melihat kehidupan politik sebagai pertukaran yang terorganisasi mencakup kalkulasi kepentingan diri aktor. Kedua, perspektif komunitas kultural; yang melihat kehidupan politik sebagai pertukaran nilai-nilai dan pandangan dunia atau hidup dalam suatu komunitas yang mempunyai budaya umum, pertukaran pengalaman dan visi. Lihat, James G. March dan Johan P. Olsen , "Elaborating The New Institutionalism", dalam ed, R.A.W. Rhodes, Sarah A. Binder dan Bert A. Rockman, *The Oxford Handbook of Political Institutions* (New York: Oxford University Press, 2006), 3-4.

[64] Mohammad A Shomali menggunakan dua pandangan dalam kajian etika; relativisme etika dan absolutisme etika. Relativisme etika mengajarkan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal. Kebenaran prinsip moral bersifat relatif atas dasar relatifitas budaya serta pilihan individu. Sementara absolutisme etika menegaskan bahwa prinsip moral itu berlaku secara universal bagi siapapun dan dimanapun. Meski demikian, baik relativisme etika maupun absolutisme etika memerlukan pemahaman antara lain dari bagaimana prinsip etika tersebut dikonstruksikan secara sosial. Di sini, Shomali meminjam perspektif konstruksi atas realitas sosial Berger dan Luckman bahwa dua prinsip etika diatas tidak lepas dari beberapa unsur dalam konstruksi tersebut, yakni eksternalisasi, obyektifasi dan internalisasi. Lihat, Mohammad Shomali, *Relativisme Etika*: *Analisis Prinsip-prinsip Moralitas* (Jakarta: Serambi, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsi dalam diri individu meski model dan jangkauan pemikiran tersebut menggambarkan klasifikasi dan intensitas yang beragam. Sementara manifestasi etika politik merupakan relasi antara subyek dengan obyek yang berada dalam jejaring struktur yang berjalan secara dialektis.

Menurut Freeden, setiap orang selalu terlibat dalam berfikir politik dengan berbagai tingkatannya meskipun mengandung perbedaan tingkat sofistikasi, intensitas dan frekuensinya. Kita semua terfokus atas hubungan kita dengan otoritas, bentuk tatanan sosial yang baik, dengan berbagai hirarki yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan publik dan sebagainya. Namun demikian, teori politik tidak selalu mempunyai aspek terbaiknya dalam melakukan identifikasi, menafsirkan dan menganalisis berbagai ambiguitas praktek politik yang muncul kepermukaan.

Dua pendekatan yang selama ini muncul adalah; Pertama, konstruksi dan preskripsi normatif yang lebih menekankan pada bentuk terbaik demokrasi partisipatoris. Perspektif normatif biasanya menekankan pada struktur nilai yang lahir dari nalar atau rasio berikut menampilkan intuisi etika manusia secara umum dan berkaitan pula dengan deliberasi reflektif suatu kelompok. Kedua, konsepsi tipe ideal yang menekankan pada makna dan bentuk keadilan yang menjadi domain filsafat politik dan etika. Pendekatan ini secara prinsipil merupakan domain sejarah ide atau gagasan terutama gagasan mengenai kontrak sosial. [65]

---

[65] Menurut Freeden, Untuk memahami dua pendekatan diatas, maka diperlukan dua karakteristik utama; Pertama, berfikir secara politis. Kedua, berfikir tentang politik. Berfikir secara politik menekankan pada serangkaian praktek pemikiran khusus mengenai kolektifitas. Hal ini berkaitan dengan bangunan pemikiran kolektif mengenai masyarakat yang baik dan menggambarkan kekuasaan melalui pembicaraan dan tulisan, distribusi dan signifikansi prioritas kebijakan. Disamping itu, berfikir tengang politik menggambarkan pola-pola pandangan yang dipegang oleh masyarakat mencakup pemikiran mereka berkaitan dengan isu dan tantangan sentral dalam kehidupan sosialnya yang merupakan domain politik. Lihat, Michael Freeden, “Thinking

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori strukturasi Giddens lahir dari dua arus fundamentalisme, yakni fundamentalisme subyek dan fundamentalisme obyek. Fundamentalisme subyek direpresentasikan oleh beberapa teori sosial berhaluan weberian sementara fundamentalisme obyek berhaluan parsonian. [66] Teori strukturasi Giddens terdiri atas beberapa unsur teoritik mencakup agen dan agensi, agensi dan kekuasaan, struktur dan strukturasi, dualitas struktur dan bentuk-bentuk institusi. [67]

Beberapa unsur konseptual-teoritik tersebut didefinisikan sebagai berikut; Pertama, agen dan agensi. Agen adalah individu atau aktor yang menjalankan kekuasaan dan menghasilkan pengaruh atau efek. Sementara agensi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dimana agen atau aktor tersebut terlibat di dalamnya.[68]

Politically and Thinking about Politics: Language, Interpretation and Ideology", dalam David Leopold dan Marc Stears, *Political Theory Methods and Approaches* (New York: Oxford University Press, 2008), 196-204.

[66] Lihat misalnya, Steven Loyal, *The Sociology of Anthony Giddens* (London: Pluto Press, 2003). Menurut Priyono, Lahirnya teori strukturasi Giddens ini berangkat dari tiga hal yang menjadi pijakannya; reinterpretasi pemikiran sosial, membangun logika dan metode ilmu sosial, dan analisis atas kemunculan lembaga-lembaga baru di era modern. Disamping itu, kelahiran teori tersebut dimulai dengan analisis kritis atas beberapa teori sosial yang sejauh ini mendominasi arus pemikiran tersebut. dia memulai dengan menelaah pemikiran Durkheim, Karl Marx dan Max Weber pada satu sisi dan Parsons, Goofman, Strauss, Sausure pada sisi lain. Beberapa pemikir yang menjadi telaah diatas bertujuan untuk membangun sinkronisasi dari dualisme, yakni subyektifisme dan obyektifisme pada satu sisi dan determinisme dan volunterisme pada sisi lain. Lihat, B. Herry Priyono, *Anthony Giddens*: *Suatu Pengantar* (Jakarta: KPG, 2002), 18-19.

[67] Lebih jauh, lihat, Anthony Giddens, *The Constitution of Society*: *Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1985), 1-40.

[68] Meski demikian, keterlibatan tersebut menempatkan aktor atau individu tidak secara pasif dipengaruhi oleh peristiwa tersebut. Lebih jauh, bentuk tindakan dalam setiap peristiwa menegaskan proses dialektika dengan peristiwa tersebut. Pada setiap peristiwa, tindakan individu atau aktor tidak selalu sama dengan tindakan yang dilakukan pada peristiwa lain. Agen dan agensi dalam teori strukturasi mencakup beberapa aspek; monitoring refleksif tindakan, rasionalisasi tindakan dan motivasi tindakan. Monitoring refleksif tindakan didefinisikan sebagai bentuk tindakan yang berjalan secara rutin yang melibatkan aktor atau agen tersebut maupun orang lain. Dalam proses ini, aktor-aktor tidak hanya memonitor atau mengawasi arus aktivitas dan mengharapkan fihak lain berbuat sama dengannya namun juga mengawasi aspek-aspek sosial dan fisikal yang menjadi tempat terjadinya interaksi atau peristiwa tersebut. Rasionalisasi tindakan adalah bentuk tindakan yang dilakukan aktor yang didasarkan pada pemahaman teoritis. Sementara motivasi tindakan didefinisikan sebagai keinginan-keinginan yang mengarahkan suatu tindakan. Meski demikian, motivasi tindakan tersebut tidak secara langsung dibatasi oleh kesinambungan dari rasionalisasi tindakan atau monitoring refleksif. Motivasi tindakan terkadang berjalan secara asing, yakni diluar rutinitas yang dalam istilah Schultz berkaitan dengan proyek-proyek tindakan tertentu. Lihat, Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Matrik 1.1.
Model stratifikasi Agen

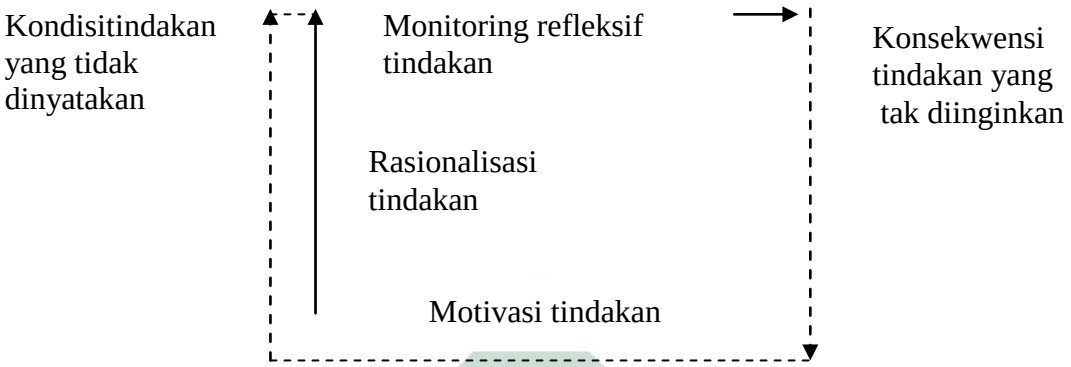

Kedua, Hubungan antara agen dan struktur ditegaskan sebagai hubungan antara aktor atau pelaku dengan struktur yang terdiri atas aturan dan sumber daya. Struktur tersebut pada satu sisi membatasi dan mengekang (*constraining*) namun pada sisi lain dapat memberdayakan (*enabling*). Menurut Giddens, hubungan antara aktor dengan struktur merupakan bentuk dualitas, bukan dualisme, dimana antara keduanya tidak terpisahkan namun justru saling mempengaruhi.

Di samping itu, hubungan antara pelaku dengan struktur dapat difahami melalui praktek sosial sebab praktek tersebut menggambarkan tentang pemikiran dan perilaku keseharian dari diri aktor dan strukturnya. Dari hubungan tersebut berikut praktek sosial yang terjadi maka melahirkan dua bentuk kesadaran, yakni kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) dan kesadaran praktis (*practical consciousness*). Dalam kesadaran praktis, posisi struktur kerapkali memenjara individu atau aktor dimana praktek sosial merupakan bentuk rutinisasi tindakan yang bahkan aktor tersebut tidak bisa menjabarkan situasi tersebut. Sementara kesadaran diskursif menegaskan aktor tersebut dapat keluar dari rutinisasi tindakan serta mampu menjabarkan praktek sosial yang terjadi dalam struktur tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, dalam strukturasi terdapat tiga gugus utama; signifikasi, dominasi dan legitimasi. Struktur signifikasi menunjuk pada model pemaknaan simbolik, penyebutan dan wacana. Struktur dominasi mengarah pada penguasaan baik atas individu maupun sumber daya lain. Dan struktur legitimasi mengarah pada peraturan normatif yang berupa norma etis maupun juridis.[69]

Menurut Priyono, Agen atau pelaku adalah orang-orang yang konkrit dalam arus kontinum tindakan dan peristiwa di dunia. Struktur adalah aturan dan sumber-daya (*rules and resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktek sosial. Konsep ruang dan waktu menurut Giddens bersifat konstitutif, yakni dengan adanya ruang dan waktu maka individu melakukan tindakan dan pengorganisasian masyarakat. [70]

Matriks 1.2.
Alur kesadaran hubungan struktur dan agen

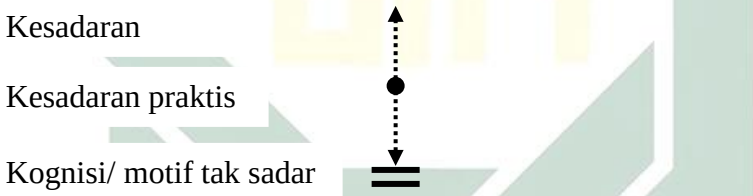

Dari perspektif teori diatas dapat ditegaskan bahwa agen dalam penelitian ini merupakan politisi legislator muslim sebagai anggota legislatif pemerintah daerah Lamongan. Sebagai agen, politisi legislator muslim tersebut menjalankan kekuasaan baik secara politis maupun administratif melekat dalam peran dan fungsi baik bersifat struktural maupun sosio-kultural. Peran dan fungsi tersebut diwujudkan dalam peristiwa dan agenda-agenda yang diatur sedemikian rupa namun terjadi proses dialektika yang melibatkan kognisi atau pemikiran politik.

[69] Lihat, Dave Elder Vass, *The Causal Power of Social Structure*: *Emergence, Structure and Agency* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 116-117.
[70] Lihat, B. Herry Priyono, *Anthony Giddens*, 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.Prosedur Penelitian.

a. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif bukan merupakan angka-angka sebagaimana pendekatan kuantitatif, namun hasil dari naskah wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Data yang berasal dari berbagai sumber tersebut kemudian dideskripsikan dengan mencocokan antara realitas empiris pada satu sisi dengan perspektif teori pada sisi lain.[71]

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif ini sebagaimana ditegaskan oleh Moleong, dapat difungsikan untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian secara holistik.. Di samping itu, pendekatan tersebut menggambarkan hakekat hubungan yang sangat esensial antara peneliti dengan informan, serta lebih peka dan adaptif terhadap manajemen pengaruh bersama mengenai pola-pola nilai yang dihadapi.[72]

Sementara menurut Nazir, metode deskriptif terhadap data difungsikan untuk mencari fakta melalui interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah sosial dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat berikut situasi-situasi tertentu didalamnya termasuk mencakup aspek hubungan sosial, tindakan sosial, sikap dan pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.[73] Dari penegasan di atas, data penelitian ini menitikberatkan pada hasil wawancara di samping pengamatan berperan serta meski di sadari bahwa tidak semua agenda lembaga legislatif di Lamongan tersebut dapat di amati secara keseluruhan.

---

[71] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2004), 131.
[72] Ibid, 138.
[73] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Informan Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa individu tersebut dinilai memahami persoalan yang berkaitan langsung dengan tema atau topik penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah anggota legislatif daerah sehingga pemilihan informan lebih bersifat purposif. [74] Meski demikian, untuk menghindari berbagai bias dalam penentuan informan maka sifat purposif di sini menitikberatkan pada karakteristik tertentu yang oleh Richards dinilai mempunyai kelebihan dalam proses penelitian.[75]

Dalam penelitian ini, penentuan informan berpijak pada seleksi individu legislator muslim yang dinilai mempunyai kapasitas dan karakteristik tertentu sebagai unsur penting bagi keberhasilan penelitian. Penentuan selektif tersebut berdasarkan pada satu anggota legislator dari setiap fraksi di lembaga DPRD Lamongan.

Di samping fraksi politik lembaga legislatif, pertimbangan lain yang digunakan adalah tempat domisili informan yang dipandang strategis. Enam informan penelitian ini merepresentasikan tiga gugus wilayah kabupaten Lamongan, yakni kawasan pantai utara (pantura), kawasan tengah dan kawasan selatan. Setiap kawasan tersebut mengandung pertimbangan strategis yang dimungkinkan menjadi unsur konsepsi dan manifestasi etika politiknya.

---

[74] Menurut Sugiyono, pendekatan purposif lebih didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 85.

[75] Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, terj. Triwibowo (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 109. Tujuan penting wawancara dengan kaum elit politik adalah memperoleh pemahaman tentang jalan pikiran aktor politik yang bersangkutan. Disini posisi elit sebagai informan dimungkinkan memberikan kemudahan sebagai bentuk kelebihan yang dikemukakan diatas. Diantara kelebihan tersebut adalah bantuan interpretasi dokumen dan laporan, interpretasi personalitas, informasi lain yang tidak tercatat serta bantuan jaringan dengan elit-elit lain dalam lembaga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1.
Nama Informan Anggota DPRD Lamongan Periode 2009-2014.

No	Nama	Fraksi	Keterangan
1	Kusmanan	Fraksi PKB	
2	Sugiarsih	Fraksi PDIP	
3	Husnul Aqib	Fraksi PAN	
4	Kacung	Fraksi Partai Golkar	
5	Sudjono	Fraksi PD dan PKS	Gabungan PD dan PKS
6	Muhammad Soib	Fraksi PKNU	

c. Emik dan Etik Penelitian.

Dalam penelitian ini, emik didefinisikan sebagai pandangan yang dimiliki oleh informan sebagai subyek yang menjadi nara-sumber data. Sementara etik didefinisikan sebagai pandangan yang dimiliki oleh peneliti. Konstruksi emik adalah deskripsi sekaligus analisis yang dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh informan atau aktor dalam suatu kejadian atau situasi yang dideskripsikan dan dianalisis. Sementara konstruksi etis adalah deskripsi dan analisis yang dibangun dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dinilai bermakna oleh peneliti. [76]

Sebagaimana dalam perspektif fenomenologi, aktor atau agen dalam penelitian ini diposisikan sebagai fihak pertama yang menjadi sumber bagi akses pengalaman termasuk mencakup mental dan isinya. Pemahaman atau pemaknaan mentalitas tersebut berasal dari rekaman sejarah hidup aktor bersangkutan berikut analisis pemikiran sehingga melahirkan deskripsi tentang aktor tersebut.[77]

[76] Konsep emik dan etik lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi terutama pengambilan masyarakat pedalaman (*native*) sebagai subyek kajian. Lihat, Ahmad F. Saifuddin, *Antropologi Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006).
[77] Amie L. Thomasson, "First Person Knowledge in Phenomenology", dalam David Woodruff Smith, *Phenomenology and Philosophy of Mind* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski demikian, pemahaman mentalitas tersebut tidak mengacu pada subyektifitas aktor namun menekankan pada bentuk mentalitas yang meniscayakan proses dan pola interaksi dengan realitas di luar diri aktor. Hal ini untuk menghindari jebakan fenomenologis yang bersifat fundamentalisme subyektif. [78]

d. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan mengenai pemikiran dan aksi politik legislator. Secara sistematis, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, hasil pengamatan yang berisi penjabaran dan uraian tentang situasi, kejadian, interaksi berikut tingkah-laku yang dapat diamati. Kedua, hasil wawancara atau pembicaraan berupa kutipan pernyataan-pernyataan informan atau orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran melalui wawancara mendalam (*indepth interview*). Ketiga, bahan tertulis berupa dokumen, surat-surat, rekaman atau pula kasus sejarah. Dalam melakukan pengumpulan data diatas maka peneliti melakukan pengamatan partisipatif. Teknik pengamatan tersebut mencakup beberapa

[78] Setiap aktor atau individu, menurut Paperzak, hidup dalam jaringan tatap muka namun tak seorang pun diantara mereka yang dapat diisolasikan dari konteks sosial dan kultural yang lebih luas dari beberapa kolektifitas yang dimiliki. Jika kita menggunakan kata intersubyektifitas untuk mengindikasikan hubungan langsung antar orang-orang atau komunalitas dan kolektifitas berikut struktur dan proses obyektif yang membentuk dunia berikut konteks kehidupan manusia maka terdapat salah satu pertanyaan fundamental yang harus ditanyakan dalam filsafat sosial dapat diformulasikan sebagai berikut; bagaimana kolektifitas dan intersubyektifitas berkaitan atau berhubungan? Dari sini bisa ditegaskan bahwa memahami kehidupan manusia adalah mengalami diri sendiri sebagai bagian dari komunitas yang berbeda dalam mana kehidupan individu berpisah atau bergabung dengan orang lain. Lihat, Adriaan T. Peperzak "Intersubjectivity and Community" dalam ed, Kevin Thompson dan Lester Embree, *Phenomenology of The Political* (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah; berperan serta terbatas dan memposisikan diri sebagai penonton, bersikap terbuka dan mendalam selama proses pengamatan partisipatif. [79]

Meski demikian, pengamatan partisipatif tidak secara total bisa dijalankan mengingat terdapat agenda-agenda tertentu yang dilakukan oleh legislator tersebut yang tidak bisa melibatkan fihak lain. Dengan demikian, wawancara menjadi alternatif utama untuk memperoleh deskripsi atau data mencakup agenda-agenda yang dilakukan.

Beberapa aspek dan langkah diatas menghasilkan data yang kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Informasi sebagai data yang dikumpulkan menitikberatkan pada informasi umum meski tidak memungkiri diperlukan informasi pribadi dan rahasia. Untuk jenis informasi pribadi dan rahasia tersebut maka peneliti berlandaskan pada etika penelitian dengan jalan melindungi unsur-unsur yang memang menjadi kesepakatan dengan informan untuk dirahasiakan.

Disamping itu, proses pengumpulan data juga mengharuskan peneliti melakukan triangulasi, yakni kombinasi dari beragam sumber data, teori dan metodologis tentang gejala yang melingkari topik penelitian. Menurut Denzin, terdapat empat bentuk triangulasi, yakni triangulasi data, triangulasi teori, triangulasi peneliti dan triangulasi metodologi. [80] Triangulasi yang ditegaskan

---

[79] Observasi partisipan dikaitkan dengan sosiologi dan antropologi dan digunakan oleh peneliti untuk menginfiltrasi situasi yang kadang menggambarkan kejadian tersembunyi serta memahami budaya dan proses yang dilakukan oleh kelompok yang diinvestigasi. Ini yang dikaitkan dengan data kualitatif. Terdapat beberapa karakteristik dalam observasi partisipan; observasi langsung, kerja lapangan, latar alami, isu persepsi. Bercker dan Geer mendefinisikan observasi partisipan sebagai metode dimana observer terlibat atau melibatkan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh yang diteliti. Pada satu sisi peneliti secara terbuka terlibat dalam kehidupan mereka dan pada sisi lain sebaliknya. Disini pengamat harus mengamati apa yang terjadi, mendengar apa yang dinyatakan dan mempertanyakannya sepanjang waktu. Lihat, Martyn Denscombe, *The Good Research Guide* (New York: Open University Press, 2010), 196-207.

[80] Lihat, Norman K. Denzin, *The Research Act*: *A Theoritical Introduction in Sociological Methods* (New York: McGraw Hills, 1978).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Denzin dalam penelitian ini dilakukan guna memperoleh deskripsi yang komprehensif mengenai topik penelitian.

e. Teknik Analisis Data.

Mengingat data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara,[81] pernyataan, gejala, deskripsi kalimat dan lainnya maka terdapat beberapa alur yang difungsikan dalam analisis data; reduksi data, interpretasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemilahan data,[82] pemusatan data, penyederhanaan data, abstraksi dan transformasi data.

Data-data termaksud merupakan data kasar hasil catatan dari selama proses di lapangan. Sementara reduksi data lebih jauh dilakukan dengan jalan meringkas data, mengode data, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus. Sementara penyajian atau presentasi data adalah penyusunan informasi atau data yang telah direduksi. Model presentasi data berbentuk dua macam, yakni teks naratif atas data atau informasi dari lapangan dan matriks atau grafik.

---

[81] Lisa Harrison, *Political Research*: *An Introduction* (New York and London: Routledge, 2001), 74-80. Alan Bryman, *Research Methods and Organization Studies* (London and New York: Routledge, 1989), 119-122. Menurut Scott dan Darlington, Sebagai metode koleksi data, wawancara mendalam juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Diantara kekuatan yang dimiliki wawancara mendalam adalah; *pertama*, memperoleh keuntungan besar yang diperoleh dari wawancara tatap muka. *Kedua*, wawancara mendalam ini membuka akses terhadap apa yang dinyakan oleh masyarakat. Wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif melibatkan lebih dari sekedar interaksi aktual. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dipertimbangkan dalam wawancara mendalam ini; menemukan dan menyeleksi partisipan, membangun koneksi atau hubungan, mempunyai kontak nama, wawancara, membuat rekaman, mengakhiri wawancara. Lihat, Yvonne Darlington and Dorothy Scott, *Qualitative Research in Practice* (Newsouth Wales: Allen and Unwin, 2002), 46-61.

[82] Dalam fenomenologi terdapat suatu pendekatan yang disebut dengan reduksi eidetik yang meliputi; *Pertama*, proses epos, yakni meletakan sebagian asumsi atau presuposisi tentang pengalaman. *Kedua*, membentuk *narrative digest*, yakni bentuk ringkasan dengan penghapusan narasi yang terlalu detail. *Ketiga*, reduksi tematik, yakni mempertahankan struktur tematik berkaitan dengan pengalaman secara umum. Lihat, Richard Steven "Phenomenological Approaches to the Study of Conscious Awareness" dalam Max Velmans, ed, *Investigating Phenomenal Consciousness* (Philadelphia: John Benjamins Publishing Co, 2000), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penegasan di atas, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap sebagaimana ditegaskan oleh Creswell yang meliputi: peneliti mulai mendeskripsikan seluruh pengalamannya, peneliti menemukan pernyataan dan pernyataan tersebut dikelompokan kedalam unit-unit bermakna, merefleksikan pemikiran informan, mengonstruksi penjelasan tentang makna dan esensi, integrasi pengungkapan pengalaman peneliti dengan informan.[83]

H. Sistematika Pembahasan.

Penelitian etika politik legislator muslim di kabupaten Lamongan pada era demokrasi lokal ini menitikberatkan pada konsepsi etika dari proses konseptualisasi dan aksi politik. Agar penjabaran setiap bab dapat sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini menjabarkan beberapa aspek yang melatarbelakangi penelitian ini. Bab ini juga meliputi identitifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan beberapa penelitian terdahulu.

Bab kedua, kajian teoritik. Kajian teoritik ini difungsikan mendukung tema atau topik di atas. Bab ini memuat beberapa konsep dan teori dari berbagai sumber yang mendukung topik kajian ini. Beberapa konsep dan teori tersebut disistematisasikan ke dalam beberapa sub-bab.

Bab ketiga, Metodologi. Dalam bab ini dibahas mengenai paradigma penelitian yang digunakan mencakup perspektif teori, pendekatan kajian dan prosesur penelitian yang digunakan.

---

[83] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*: *Choosing Among Five Traditions* (London: Sage Publications, 1998), 147-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, Pembahasan hasil penelitian. Pembahasan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian utama, yakni konsepsi etika politik dan manifestasi politik legislator dalam struktur kekuasaan.

Bab kelima, Analisis konsepsi etika Politik. Analisis ini terfokus pada proses pembentukan konsepsi etika politik berikut unsur-unsur di dalamnya. Di samping itu, bab ini memuat analisis strukturasi dengan perangkat konseptual berupa model stratifikasi tindakan dan model stratifikasi struktur serta aspek pemberdayaan dan pengekangan. Meski demikian, analisis ini tidak bisa mengabaikan triangulasi teoritik sebagai bagian dari dialektika antar teori namun tetap berpusat pada perspektif strukturasi tersebut.

Bab keenam, Analisis Manifestasi etika politik. Analisis ini menitikberatkan pada bagaimana etika tersebut dimanifestasikan dalam fungsi dan peran struktural legislator muslim di lembaga legislatif dengan menggunakan perspektif strukturasi.

Bab ketujuh, Penutup. Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan, implikasi teoritik, keterbatasan kajian dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id